

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN OPINI  
AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Skripsi**  
**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**  
**Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**  
***Andina Yulia Permata Sari***  
**Nim : 31402300128**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**SEMARANG**  
**2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN OPINI  
AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Skripsi**  
**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**  
**Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**  
***Andina Yulia Permata Sari***  
**Nim : 31402300128**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**SEMARANG**  
**2024**

## **SKRIPSI**

# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh :

*Andina Yulia Permata Sari*

Nim : 31402300128

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 November 2024

Pembimbing,



Pro Vita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.

NIK. 211403012

**PERAN INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS,  
TEKANAN WAKTU DAN TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KUALITAS AUDIT  
INTERNAL PEMERINTAH**

Disusun oleh:  
**Andina Yulia Permata Sari**  
NIM 31402300128

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 29 Bulan November 2024

**Susunan Dewan Penguji**

Penguji,



Drs. Osmad Muthaher, SE., M.Si., Akt  
NIK. 210403050

Penguji,



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si., CSRA, CSRA  
NIK. 211415029

Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D.  
NIK. 211403012

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat  
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 29 Bulan November 2024  
Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.

NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andina Yulia Permata Sari  
NIM : 31402300128  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyatakan,



Andina Yulia Permata Sari  
NIM. 31402300128

## **ABSTRAK**

### **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah”**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit. Variabel dependennya yaitu kinerja keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2023. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini yaitu pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2023. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pada LHP atas LKPD pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2023 dari BPK RI serta data opini audit pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics versi 27. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, belanja modal dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Opini Audit, Kinerja Keuangan

## ***ABSTRACT***

*The objective of this research is to determine the effect of local revenue, balance funds, capital expenditure, and audit opinion on financial performance of the city government in Central Java Province. The independent variables of this research are local revenue, balance funds, capital expenditure, and audit opinion. The dependent variable is the financial performance. The population in this research is the city government in Central Java Province for 2015-2023. The sampling method in this research is the saturated sampling method. The research sample in this research is the city government in Central Java Province for 2015-2023. The type data of this research is secondary data that consist of financial statements in the Audit Report on Regional Government Financial Statements of the city government in Central Java Province for 2015-2023 from BPK RI and data of audit opinion of the city government in Central Java Province for 2015-2023 from BPK RI Central Java Province Representative. The data collection method is the documentation method. The data analysis technique is multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics version 27. The results of this research show that local revenue and balance funds have a positive effect on financial performance, while capital expenditure and audit opinion have no effect on financial performance.*

**Keywords:** *Local Revenue, Balance Funds, Capital Expenditure, And Audit Opinion, Financial Performance*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
5. Kepada Bapak Subandi dan Ibu Lilies Setyowatie selaku orang tua saya, Anditya Okta Wiranata selaku kakak saya, serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh rekan mahasiswa kelas RPL S-1 Akuntansi yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga masih terdapat ketidaksempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 November 2024

Penulis,



Andina Yulia Permata Sari  
NIM. 31402300128

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	7
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN .....	8
1.4 TUJUAN PENELITIAN .....	8
1.5 MANFAAT PENELITIAN .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 LANDASAN TEORI .....	9
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	9
2.2 VARIABEL PENELITIAN.....	11
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	11
2.2.2 Dana Perimbangan .....	16
2.2.3 Belanja Modal .....	17
2.2.4 Opini Audit .....	19
2.2.5 Kinerja Keuangan.....	21
2.3. PENELITIAN TERDAHULU.....	23
2.4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	33
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan .....	33
2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan ..	34
2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan .....	35
2.4.4 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan .....	36
2.5. KERANGKA PENELITIAN.....	37

BAB III METODE PENELITIAN .....	39
3.1. JENIS PENELITIAN .....	39
3.2. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	39
3.2.1 Populasi Penelitian .....	39
3.2.2 Sampel Penelitian.....	39
3.3. SUMBER DAN JENIS DATA.....	40
3.4. METODE PENGUMPULAN DATA .....	40
3.5. DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR.....	41
3.5.1 Variabel Independen.....	41
3.5.2 Variabel Dependen .....	41
3.6. PENGUKURAN VARIABEL.....	42
3.7. METODE ANALISIS DATA.....	43
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	44
3.7.2.1 Uji Normalitas.....	44
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas .....	44
3.7.2.3 Uji Autokorelasi .....	45
3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	45
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	46
3.7.4 Uji Kesesuaian Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ).....	47
3.7.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	47
3.7.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	47
3.7.5 Pengujian Hipotesis.....	48
3.7.5.1 Uji Parsial (Uji Signifikansi T) .....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	49
4.2 PENYAJIAN DATA.....	49
4.3 ANALISIS DATA.....	50
4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	52
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	57
4.3.4 Uji Kesesuaian Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ).....	59
4.3.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	59
4.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	60
4.3.5 Pengujian Hipotesis .....	61
4.3.5.1 Uji Parsial (Uji Signifikansi T) .....	61
4.4 PEMBAHASAN .....	63

4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan .....	63
4.4.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan....	64
4.4.3	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan .....	65
4.4.4	Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan.....	65
BAB V PENUTUP .....		67
5.1	KESIMPULAN.....	67
5.2	IMPLIKASI .....	68
5.3	KETERBATASAN PENELITIAN.....	68
5.4	AGENDA PENELITIAN MENDATANG .....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN.....		73

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 : Rasio Efisiensi Antar Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2021 .....	6
Tabel 2. 1 : Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	23
Tabel 2. 2 : Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 2. 3 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3. 1 : Variabel dan Indikator.....	41
Tabel 3. 2 : Interval Koefisien Determinasi .....	48
Tabel 4. 1 : Statistik Deskriptif .....	50
Tabel 4. 2 : Uji Normalitas.....	53
Tabel 4. 3 : Uji Multikolinearitas .....	54
Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4. 5 Uji heteroskedastisitas .....	56
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
Tabel 4. 7 Uji Statistik F .....	60
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi .....	60
Tabel 4. 9 Uji T .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian.....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya telah diatur oleh peraturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 terkait pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat oleh undang-undang.

Pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan dalam menjalankan otonomi daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Pemerintah daerah harus mampu dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan daerahnya. Dengan adanya PAD yang tinggi, kinerja keuangan semakin meningkat sehingga semakin banyak program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dijalankan dengan baik. Penelitian oleh Pangestu (2023), Wahyudin & Hastuti (2020), dan Fatmawasti & Pratiwi (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan PAD yang tinggi, pembangunan pemerintah daerah akan maksimal sehingga dapat menghasilkan keuangan daerah yang lebih baik. Sedangkan, hasil penelitian oleh Niswani dkk (2022) dan Endri & Dini (2020) menyatakan bahwa

PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pemerintah daerah dalam memperoleh kekayaan daerahnya sendiri melalui PAD sehingga kinerja keuangan masih kurang.

Pemerintah pusat turut ikut serta membantu pemerintah daerah dalam mendanai otonomi daerah. Melalui pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar mengurangi kesenjangan keuangan antar pemerintah daerah. Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjanya melalui melaksanakan kegiatan yang produktif. Penelitian oleh Fatmawasti & Pratiwi (2019) dan Wahyudin & Hastuti, (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, hasil penelitian oleh Niswani dkk (2022) dan Pangestu (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh mencerminkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Bab X Bagian Kesatu Pasal 258 Ayat 1 yang menyatakan bahwa daerah melakukan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, lapangan berusaha, kesempatan kerja, akses dan kualitas pelayanan public, serta daya saing daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah,

pemerintah daerah harus dapat memproyeksikan, menentukan, dan mengelola belanja daerahnya dengan baik. Dengan adanya pengelolaan belanja daerah yang baik, perekonomian daerah akan meningkat melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Belanja modal adalah salah satu jenis belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dengan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal tersebut diantaranya seperti peralatan, infrastruktur, pembangunan, dan aset tetap lainnya. Melalui belanja modal, kekayaan dan aset daerah akan meningkat sehingga dapat kinerja keuangan dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat serta menambah belanja rutin lainnya pada daerah tersebut. Penelitian oleh Zahrah dkk (2024) dan Niswani dkk (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, hasil penelitian oleh Pangestu (2023) dan Jauharriah (2022) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belanja modal pada aset tetap dapat menjadi pemborosan apabila pemerintah dalam melaksanakan belanja modalnya tidak bertujuan untuk menguntungkan pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Bab VII Bagian Kedua Pasal 58

menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menyatakan bahwa kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang kedaulatan tertinggi negara, yaitu rakyat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk hasil akhir tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai institusi pemeriksa atas pengelolaan keuangan negara, diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tahunan dengan tujuan untuk menilai kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Atas penilaian tersebut, BPK dapat memberikan opini yang terdiri dari wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adverse*), atau tidak memberikan pendapat (*disclaimer*). Opini audit sering menjadi dasar dalam menilai kinerja keuangan suatu daerah (Maharani & Arofah, 2021). Jika suatu pemerintah daerah mendapatkan opini audit baik maka kinerja keuangannya dinilai baik. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Zahrah dkk (2024) dan Jennie S. Sir (2021) yang menyatakan bahwa opini audit mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin baik opini audit menunjukkan adanya kenaikan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian oleh Endri & Dini (2020) dan Pratama dkk (2022) menyatakan bahwa opini audit tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk mengetahui informasi posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penilaian atas kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan adanya penilaian tersebut, pemerintah memiliki acuan untuk melakukan semua urusan pemerintahan menjadi lebih baik.

Efisiensi adalah salah satu hal indikator penting yang harus diperhatikan dalam menilai kinerja keuangan. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi fiskal menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Desentralisasi fiskal memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan di daerahnya (Christia & Ispriyarso, 2019). Dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah setempat harus dapat melakukan pengeluaran atau belanja sesuai prioritas dan kebutuhan daerahnya. Kinerja efisien perlu tetap dijaga dengan menggunakan *input* (pendapatan) seminimal mungkin untuk *output* (belanja) semaksimal mungkin sehingga kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Fathah (2017) bahwa rasio efisiensi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena semakin efisien daerah dalam mengelola keuangannya.

Pemerintah daerah harus dapat menggunakan dan mengelola keuangannya dengan baik karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus dapat efisien dalam kinerja keuangannya dengan

menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin untuk mendapatkan output yang maksimal. Hal ini sejalan dengan Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya harus dilakukan salah satunya yaitu efisien. Kemampuan ini dapat dilihat dari rasio efisiensi. Menurut Karina & Wibowo (2022), rasio efisiensi beberapa kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 dalam tabel 1.1 menunjukkan masih terdapat fluktuasi setiap tahunnya antar kota di Jawa Tengah.

Tabel 1. 1 : Rasio Efisiensi Antar Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Kota Magelang	103,22%	102,83%	84,38%
Kota Semarang	106,42%	101,50%	93,83%
Kota Surakarta	101,90%	103,42%	89,53%
Kota Tegal	92,86%	100,93%	103,01%

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, opini audit, dan kinerja keuangan yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah”**.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diminta untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya untuk mendanai kegiatan pemerintahannya dengan memanfaatkan dan mengelola potensi kekayaan daerahnya untuk meningkatkan PAD-nya dan memanfaatkan dan mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan kebutuhan daerahnya. Dengan adanya sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus memproyeksikan, menentukan, dan mengelola belanja daerahnya dengan baik terutama belanja modal. Belanja modal harus dilakukan untuk kegiatan yang produktif sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan kinerja keuangan dapat meningkat sehingga kekayaan dan aset daerah akan meningkat serta menambah belanja rutin lainnya pada daerah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah harus dapat menjalankan asas akuntabilitasnya yaitu pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan negaranya melalui pemeriksaan LKPD oleh BPK yang nantinya tercermin dalam opini audit. Dengan adanya hal ini, pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

### **1.3 PERTANYAAN PENELITIAN**

Dengan melakukan penelitian terkait pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menguji beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 2) Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 3) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 4) Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan.

### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

#### **1) Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Selain

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi salah satu referensi penelitian selanjutnya.

## **2) Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit terhadap kinerja keuangan serta dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah atas laporan keuangan memiliki hubungan dengan teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976, dikutip dalam Masdiantini & Erawati, 2016), teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan dalam bentuk kontraktual antara *principal* dan *agent*. Agen diberi pendelegasian untuk menggunakan dan mengelola sumber daya ekonomis milik *principal*.

Dalam pemerintahan daerah, teori keagenan memandang bahwa agent diperankan oleh pemerintah daerah dan principal diperankan oleh masyarakat yang diproyeksikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Ivana, 2021). Masyarakat, sebagai pemilik sumber daya ekonomi, menyerahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Atas penggunaan dan pengelolaan tersebut, pemerintah daerah harus melakukan kinerja dengan baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan yang dilakukan. Dengan demikian, pemerintah harus dapat mengelola sumber daya ekonomi yang diberikan seefisien mungkin untuk belanja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara periodik sebagai bentuk pelaporan atas pengelolaan tersebut.

Asimetri informasi adalah salah satu masalah dalam keagenan. Asimetri informasi adalah kondisi dimana *agent* mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh *principal*. Asimetri informasi dalam sektor pemerintahan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan oleh pemerintah selaku sebagai *agent*. Penyimpangan tersebut dapat berupa penyelewengan wewenang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. DPRD sebagai wakil rakyat wajib melakukan penilaian dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan dan mengelola keuangannya untuk memastikan apakah pemerintah daerah telah mengutamakan kepentingan publik.

*Agency cost* timbul untuk mengatasi permasalahan penyimpangan yang terjadi pada keagenan. *Agency cost* dalam sektor pemerintahan yaitu perlunya pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan tersebut yaitu adanya pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. BPK berperan memberikan keyakinan atas kebenaran laporan keuangan yang telah disusun pemerintah daerah selaku *agent* sebagai bentuk akuntabilitas keuangan. Atas hasil pemeriksaan keuangan tersebut, opini audit dihasilkan. Opini audit adalah salah satu hal yang penting bagi masyarakat dalam mengukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah (Parwanto & Harto, 2017). Apabila pemerintah dapat mendapatkan opini audit yang baik, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), akuntabilitas pemerintah atas penyelenggaraan keuangan anggarannya telah dilakukan dengan baik

## **2.2 VARIABEL PENELITIAN**

### **2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh atas pengelolaan kekayaan daerahnya sendiri. Melalui PAD, pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan memanfaatkan potensi asli daerahnya. Pemerintah perlu melakukan analisis berbagai potensi di daerahnya dan mengembangkannya sehingga dapat menjadi pendapatan daerah. Sumber PAD menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

PKB yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

##### **b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

BBNKB yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau karena jual beli, tukar-menukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Alat Berat (PAB)

PAB yaitu pajak kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PBBKB yaitu pajak penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor dan alat berat.

e. Pajak Air Permukaan (PAP)

PAP adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

f. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai pada rokok.

g. Opsen Pajak MBLB

Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) adalah opsen atas pokok pajak MBLB.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 yaitu pajak atas bumi bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh badan atau orang pribadi.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah bangunan.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

PBJT yaitu pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu oleh konsumen akhir.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk memperkenalkan, mempromosikan, menarik perhatian umum, atau menganjurkan terhadap sesuatu.

e. Pajak Air Tanah (PAT)

PAT yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)

Pajak MBLB yaitu pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Opsen PKB yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atas pokok PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

Opsen BBNKB yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atas pokok BBNKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pemberian jasa atau izin tertentu untuk kepentingan badan atau orang pribadi yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum dikenakan atas pelayanan kebersihan, kesehatan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi atas pelayanan ini tidak dapat dipungut jika potensi penerimaannya kecil dan/atau pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah.

### b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dikenakan atas penyediaan/pelayanan barang jasa sebagai berikut:

- Penyediaan tempat pelelangan ternak, ikan, hasil hutan, dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam tempat pelelangan;
- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan, pasar grosir, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Pelayanan pemotongan hewan ternak;

- Pelayanan penyeberangan barang atau orang menggunakan kendaraan di air;
- Pelayanan tempat rekreasi, olahraga, dan pariwisata;
- Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu dikenakan atas pelayanan pemberian izin sebagai berikut:

- Persetujuan bangunan gedung;
- Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- Pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan atas penyertaan modal daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah adalah sebagai berikut:

- Hasil penjualan atau pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- Hasil kerja sama daerah;
- Pendapatan bunga;
- Hasil pengelolaan dana bergulir;
- Penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- Komisi, potongan, atau bentuk lain karena penjualan, tukar-menukar, asuransi, hibah, atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain akibat penyimpanan uang pada bank atau hasil pemanfaatan barang daerah;
- Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Pendapatan denda pajak atau retribusi daerah;
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- Pendapatan dari BLUD; dan
- Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Dana Perimbangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kebutuhan daerah. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

DBH dari pajak yaitu PBB, BPHTB, PPh Pasal 21, serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan, DBH

dari sumber daya alam diantaranya berasal dari pertambangan umum/minyak bumi/panas bumi/gas bumi, kehutanan, dan perikanan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah pengalokasian dana pendapatan APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta pemerataan keuangan antar daerah . DAU ditetapkan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri neto pada APBN.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana dari pendapatan APBN kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah dan sesuai prioritas nasional. DAK ditetapkan setiap tahun pada APBN. Terdapat 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan pemerintah terkait DAK. Kriteria tersebut yaitu:

- Kriteria umum

Kemampuan keuangan APBD dipertimbangkan dalam penetapan DAK.

- Kriteria khusus

Karakteristik daerah dan peraturan perundang-undangan dipertimbangkan dalam penetapan DAK.

- Kriteria teknis

DAK ditetapkan oleh kementerian/departemen teknis.

### **2.2.3 Belanja Modal**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka

memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal tersebut diantaranya tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal atas aset tetap dianggarkan sebesar harga perolehan, yang terdiri atas harga beli atau bangun aset ditambah semua belanja terkait pengadaan/pembangunan aset hingga siap digunakan. Kriteria belanja modal aset tetap yaitu diantaranya

1. Berwujud
2. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
3. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset
4. Digunakan untuk kegiatan pemerintahan
5. Tidak untuk dijual dalam operasi normal
6. Biaya perolehan dapat diukur andal

Sedangkan kriteria belanja modal aset lainnya yaitu:

1. Dapat diidentifikasi,
2. Tidak memiliki wujud fisik
3. Dimiliki untuk menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual
4. Memiliki manfaat ekonomi masa depan
5. Dapat dikendalikan entitas

Alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting (Sugiyanta, 2016). Belanja modal pemerintahan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah. Hal ini terjadi jika belanja modal

memiliki tujuan untuk investasi yang bersifat produktif seperti pembangunan/perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana publik. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasio belanja modal yang bersifat produktif dalam APBD, semakin baik pengaruhnya terhadap perekonomian daerah.

#### **2.2.4 Opini Audit**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, opini adalah pernyataan profesional pemeriksa tentang tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Opini tersebut dimuat pada laporan hasil pemeriksaan setelah BPK melakukan pemeriksaan/audit atas laporan keuangan. Menurut Bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 kriteria dalam menentukan opini audit yaitu:

1. Kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP),
2. Kecukupan pengungkapan,
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

BPK sebagai pemeriksa dapat memberikan 4 (empat) jenis opini atas pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yaitu:

1. Wajar tanpa pengecualian (WTP)

Opini WTP diperoleh jika tidak ada salah saji atas semua pos laporan keuangan secara material, laporan keuangan disajikan sesuai SAP secara wajar, dan sistem pengendalian internal memadai.

2. Wajar dengan pengecualian (WDP)

Opini WDP diperoleh jika sistem pengendalian internal telah memadai tetapi ada salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.

3. Tidak wajar (TW)

Opini TW diperoleh jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan ada salah saji yang material pada banyak pos laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidak disajikan secara wajar menurut SAP.

4. Tidak memberikan pendapat (TMP)

Opini TMP diperoleh jika ada nilai yang secara material tidak dapat diyakini oleh pemeriksa/auditor karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak memiliki cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Hal ini mengakibatkan auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Opini audit BPK dapat menjadi tolok ukur dalam menilai akuntabilitas entitas pemerintah sehingga mempengaruhi kredibilitas entitas tersebut. Selain itu, opini audit BPK dapat menjadi tolok ukur bagi masyarakat terkait kualitas dari tata kelola, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas atas kinerja pelaksanaan pemerintahan (BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik opini audit maka semakin baik kinerja pemerintah. Hal ini didukung dengan penelitian Wijayanti & Suryandari (2020) yang menyimpulkan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta penelitian Aswar (2019) yang menyimpulkan opini audit memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini pemeriksaan memiliki pengaruh positif secara signifikan

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena dapat menunjukkan akuntabilitas pelaporan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **2.2.5 Kinerja Keuangan**

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Atas anggaran yang diberikan, penggunaan anggaran juga harus dianalisis untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya serta dapat mengalokasikan sumberdaya agar tepat sasaran (Majid, 2019).

Menurut Zahrah et al (2024), kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja keuangan adalah salah satu bentuk pengukuran kinerja menggunakan indikator keuangan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Membantu dalam memperbaiki kinerja pemerintah
2. Membantu dalam pembuatan suatu keputusan dan pengalokasian sumber daya
3. Memperbaiki komunikasi kelembagaan dan mewujudkan pertanggungjawaban

Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Surachman & Handayani, 2020).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tertuang dalam LKPD yang

menyajikan realisasi anggaran, kinerja keuangan, dan posisi keuangan. Atas LKPD tersebut, pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan.

Rasio keuangan adalah salah satu cara dalam mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan dihitung dengan cara membandingkan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa ukuran rasio keuangan yang dapat dihitung dan dibandingkan sehingga menghasilkan kinerja keuangan pemerintah seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio efisiensi merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat dikatakan semakin baik apabila semakin efisien kinerja keuangannya.

Efisiensi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin untuk mendapatkan output yang maksimal. Semakin tinggi rasio efisien maka semakin rendah kinerja keuangannya, sedangkan semakin rendah rasio efisien maka semakin tinggi kinerja keuangannya. Menurut (Jauharriah, 2022), tingkat efisiensi dalam pemerintahan dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 1 : Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan (Jauharriah, 2022)**

<b>Keterangan</b>	<b>Rasio efisiensi (%)</b>
Tidak efisien	$X > 100\%$
Efisien berimbang	$X = 100\%$
Efisien	$X < 100\%$

Dari hasil perhitungan rumus di atas, pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila jumlah realisasi belanja lebih kecil daripada jumlah realisasi pendapatan. Hal ini berarti pemerintah dapat menggunakan sumber daya dengan seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal. Dengan demikian, tingkat efisiensi ini memberikan gambaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya apakah lebih besar belanja atau pendapatannya.

### 2.3. PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan saat ini.

**Tabel 2. 2 : Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti Tahun</b>	<b>Variabel, Sampel &amp; Teknik Analisis</b>	<b>Hasil</b>
1.	Zahrah et al. (2024)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p><b>Independen :</b> 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2) Opini audit 3) Belanja modal</p> <p><b>Sampel :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Opini audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2018-2021 (total 152 sampel data) <b>Metode :</b> Analisis regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• PAD, opini audit, dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>
2.	Niswani dkk. (2022)	<b>Dependen :</b> Kinerja keuangan daerah <b>Independen :</b> 1) Belanja modal 2) Dana perimbangan 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Sampel :</b> 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh tahun 2016-2020 (total 115 sampel data) <b>Metode :</b> Analisis regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah</li> </ul>
3.	Pangestu (2023)	<b>Dependen :</b> Kinerja keuangan <b>Independen :</b> 1) Pajak daerah 2) Dana perimbangan 3) Pendapatan asli daerah 4) Belanja modal <b>Sampel :</b> 33 pemerintah kabupaten di Sumatera Utara tahun 2018-2020 (total 99 data) <b>Metode :</b> Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
4.	Wahyudin & Hastuti (2020)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p><b>Independen :</b> 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2) Dana Perimbangan 3) Belanja Modal</p> <p><b>Sampel :</b> 27 pemerintah kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2018</p> <p><b>Metode :</b> Analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD positif terhadap keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah</li> <li>• Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• PAD, dana perimbangan, dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>
5.	Pratama et al. (2022)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p><b>Independen :</b> 1) Opini audit 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3) <i>Intergovernmental revenue</i></p> <p><b>Sampel :</b> 29 pemerintah kabupaten di Jawa Barat tahun 2017-2019 (total 87 sampel data)</p> <p><b>Metode :</b> Analisis regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Opini audit, PAD, dan <i>intergovernmental revenue</i> dapat</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
			mempengaruhi secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
6.	Jauharriah (2022)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja keuangan</p> <p><b>Independen :</b> 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2) Belanja modal</p> <p><b>Sampel :</b> Pemerintah Kota Bogor tahun 2014-2021 (total 8 sampel data)</p> <p><b>Metode :</b> Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>• PAD dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
7.	Setiawan et al. (2020)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja keuangan</p> <p><b>Independen :</b> 1) Tingkat kekayaan daerah 2) Belanja daerah 3) Opini audit</p> <p><b>Sampel :</b> 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2017 (total sampel 81 data)</p> <p><b>Metode :</b> Analisis regresi linear berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Hasil opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
8.	Sir et al., (2021)	<p><b>Dependen :</b> <i>Financial Performance</i></p> <p><b>Independen :</b> <i>Previous year's audit opinion</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Realisasi PAD dan realisasi belanja operasional berpengaruh positif</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		<p><b>Moderasi :</b>            1) <i>Realization of original local government revenue (PAD)</i>            2) <i>Realization of regional operational expenditures</i></p> <p><b>Sampel :</b>            22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015-2019 (total sampel 88 data)</p> <p><b>Metode :</b>            Analisis regresi linear berganda</p>	<p>signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi PAD</li> <li>• Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja operasional.</li> </ul>
9.	Putra (2022)	<p><b>Dependen :</b>            Kinerja keuangan</p> <p><b>Independen :</b>            1) Belanja daerah            2) Rasio pajak            3) Rasio retribusi            4) <i>Independent financing</i>            5) SILPA            6) Opini audit            7) Jumlah aset</p> <p><b>Sampel :</b>            15 pemerintah kabupaten/kota dan 1 pemerintah provinsi di Sulawesi Utara tahun 2014-2020 (total 112 data)</p> <p><b>Metode :</b>            Regresi <i>Least Square Dummy Variable (LSDV)</i> dengan model <i>fixed effect</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pemerintah, <i>independen financing</i>, opini BPK, rasio pajak, dan SILPA memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Rasio retribusi dan jumlah aset tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
10.	Endri & Dini (2020)	<p><b>Dependen :</b>            Kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal, PAD, dan opini audit secara simultan berpengaruh signifikan</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		<b>Independen :</b> 1) Belanja modal 2) Pendapatan asli daerah (PAD) 3) Opini audit <b>Sampel :</b> Pemerintah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018 (total 30 sampel data) <b>Metode :</b> Analisis regresi linear berganda	terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>
11.	Fatmawasti & Pratiwi (2019)	<b>Dependen :</b> Kinerja keuangan <b>Independen :</b> 1) Pendapatan asli daerah (PAD) 2) Dana perimbangan <b>Sampel :</b> Pemerintah Kota Cimahi (total 60 sampel data) <b>Metode :</b> Analisis regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</li> <li>• PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</li> </ul>

Tabel 2. 3 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Zahrah dkk. (2024)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (PAD, opini audit, dan belanja modal) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi 2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sedangkan

No	Peneliti Tahun	Persamaan	Perbedaan
			<p>penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu dana perimbangan.</p>
2.	Niswani dkk. (2022)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (Belanja modal, dana perimbangan, dan PAD) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten/kota di Aceh sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu opini audit.</p>
3.	Pangestu (2023)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (Dana perimbangan, PAD, dan belanja modal) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten di Sumatera Utara sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu opini audit.</p>
4.	Wahyudin & Hastuti (2020)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (PAD, Dana perimbangan, dan belanja modal) serta	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan</p>

No	Peneliti Tahun	Persamaan	Perbedaan
		variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten di Jawa Barat sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu opini audit.</p>
5.	Pratama dkk. (2022)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (opini audit, PAD, dan <i>intergovernmental revenue</i> /dana perimbangan) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten di Jawa Barat sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu belanja modal.</p>
6.	Jauharriah (2022)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (PAD dan belanja modal) dan variabel dependen (kinerja keuangan) serta jenis penelitian sama (skripsi)	<p>1. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu Pemerintah Kota Bogor sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>2. Ada penambahan variabel independen yaitu opini audit dan dana perimbangan.</p>
7.	Setiawan dkk. (2020)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (belanja daerah dan opini	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan</p>

No	Peneliti Tahun	Persamaan	Perbedaan
		audit) serta variabel dependen (keuangan)	<p>penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu dana perimbangan dan PAD.</p>
8.	Sir et al., (2021)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (opini audit) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Terdapat variabel moderasi pada penelitian terdahulu</p> <p>3. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten/kota di NTT sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>4. Ada penambahan variabel independen yaitu belanja modal, PAD, dan dana perimbangan.</p>
9.	Putra (2022)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (opini audit) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu</p>

No	Peneliti Tahun	Persamaan	Perbedaan
			<p>yaitu pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Sulawesi Utara sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu belanja modal, PAD, dan dana perimbangan.</p>
10.	Endri & Dini (2020)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (belanja modal, PAD, dan opini audit) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu pemerintah kabupaten/kota dan di D.I Yogyakarta sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p> <p>3. Ada penambahan variabel independen yaitu dana perimbangan.</p>
11.	Fatmawasti & Pratiwi (2019)	Kesamaan penggunaan pada variabel independen (PAD dan dana perimbangan) serta variabel dependen (kinerja keuangan)	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi</p> <p>2. Lokus penelitian penelitian terdahulu yaitu Pemerintah Kota Cimahi sedangkan penelitian saat ini pemerintah kota di Jawa Tengah.</p>

No	Peneliti Tahun	Persamaan	Perbedaan
			3. Ada penambahan variabel independen yaitu belanja modal dan opini audit.

## 2.4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dikaitkan dengan teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan

PAD adalah salah satu pendapatan yang berkontribusi sangat penting terhadap kemajuan suatu daerah. Hal ini dikarenakan PAD menggambarkan pemanfaatan sumber kekayaan daerah untuk menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri. Apabila suatu daerah dapat meningkatkan pendapatannya melalui pengelolaan sumber kekayaan daerahnya secara optimal, kinerja keuangan pemerintah nantinya akan berjalan semakin baik.

Dalam teori keagenan, DPRD sebagai wakil masyarakat di tingkat daerah wajib untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya yaitu menilai dan mengawasi atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD atas pengelolaan dan pemanfaatan potensi kekayaan daerahnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dengan baik. Berdasarkan penelitian Pangestu (2023) serta Wahyudin & Hastuti (2020), PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

di tingkat kabupaten/kota. Melalui peningkatan PAD, pembangunan suatu daerah akan semakin baik. Hal ini dikarenakan daerah mampu dalam mengoptimalkan potensi pendapatannya sehingga akan berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Dengan demikian, hipotesisnya sebagai berikut :

**H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan**

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah dari APBN untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Melalui dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkat. Hal ini dikarenakan pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam teori keagenan, DPRD sebagai wakil masyarakat di tingkat daerah wajib untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya yaitu menilai dan mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dan pengelolaannya telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pemerintah pusat yaitu mendukung otonomi daerah dan kegiatan pemerintah daerah yang produktif dengan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian Wahyudin & Hastuti (2020) dan Fatmawasti & Pratiwi (2019), dana

perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui pemberian dana keseimbangan, pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakannya untuk kegiatan pemerintahan yang produktif dan konstruktif sehingga dapat menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar. Dengan demikian, hipotesisnya sebagai berikut:

**H2 : Dana keseimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

### **2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan**

Belanja modal adalah salah satu belanja yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang pemanfaatannya lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahannya. Melalui belanja modal, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas seperti pembangunan/perbaikan infrastruktur maupun sarana dan prasarana publik sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah dan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Dalam teori keagenan, DPRD sebagai wakil masyarakat di tingkat daerah wajib untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya yaitu menilai dan mengawasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan belanja modal dilakukan untuk kegiatan yang produktif dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berdampak terhadap kinerja keuangan yang semakin baik. Berdasarkan penelitian Zahrah dkk (2024) dan Niswani dkk (2022), belanja modal berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan. Belanja modal memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat ketika menerima pelayanan. Selain itu, belanja modal dapat menghasilkan efisiensi di berbagai sektor dan meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian daerah dapat meningkat sehingga pertumbuhan kinerja keuangan daerah semakin baik. Dengan demikian, hipotesisnya sebagai berikut:

**H3 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

#### **2.4.4 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Opini audit adalah pernyataan professional oleh pemeriksa atas kewajaran laporan keuangan pemerintah. Opini BPK dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan (Putra, 2022). Opini audit juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan demikian, semakin baik opini audit menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

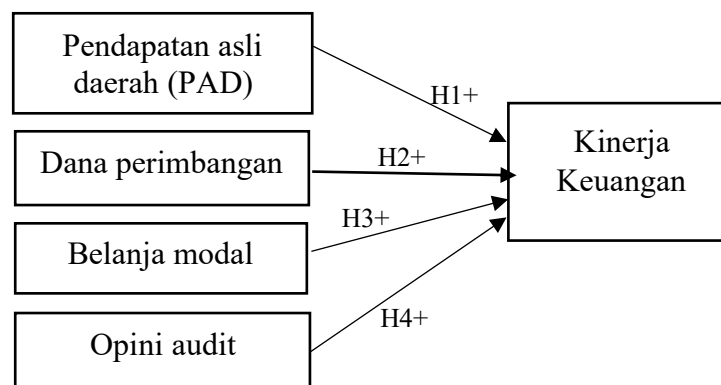
Dalam teori keagenan, DPRD sebagai wakil masyarakat di tingkat daerah wajib untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya yaitu menilai dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kinerja keuangan pemerintah daerah tetap terjaga, salah satunya yaitu memperoleh opini audit yang baik. Hal ini dikarenakan opini audit adalah hal yang sangat penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jennie S.Sir (2021) dan Putra (2022), opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP memiliki kinerja keuangan yang baik ditandai dengan nilai rasio efisiensi yang kecil dibandingkan pemerintah daerah dengan opini selain WTP. Dengan demikian, hipotesisnya sebagai berikut:

**H4 : Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

## 2.5. KERANGKA PENELITIAN

Model kerangka penelitian pada penelitian ini menempatkan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit sebagai variabel independen serta kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. JENIS PENELITIAN**

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menguji suatu teori melalui pengukuran variabel penelitian berupa angka dan penganalisisan data menggunakan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2016).

#### **3.2. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN**

##### **3.2.1 Populasi Penelitian**

Populasi yaitu wilayah secara umum yang terdiri dari obyek atau subyek yang ditentukan peneliti yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2023.

##### **3.2.2 Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2020), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2020), metode sampling jenuh yaitu metode penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 6 (enam) pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023.

### **3.3. SUMBER DAN JENIS DATA**

Jenis data penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Malik (2018), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang berasal dari berbagai sumber yang ada, seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder pada penelitian ini meliputi laporan keuangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP atas LKPD) pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023 yang diperoleh dari BPK RI serta data opini audit pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023 yang diperoleh dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitu <https://jateng.bpk.go.id/>.

### **3.4. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2020), dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya monumental dari seseorang/instansi. Setelah memperoleh dan mengumpulkan data tersebut, peneliti melakukan penelaahan atas data tersebut. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada LHP atas LKPD pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023 yang diperoleh dari BPK RI serta data opini audit pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023 yang diperoleh dari *website* BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitu <https://jateng.bpk.go.id/>.

### 3.5. DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

#### 3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2020). Variabel independen pada penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit.

#### 3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena variabel independen (Sugiyono, 2020). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan.

**Tabel 3. 1 : Variabel dan Indikator**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<b>Variabel Dependen</b>			
1	Kinerja keuangan	Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Zahrah et al., 2024)	Diukur dengan menggunakan rasio efisiensi (Jauharriah, 2022)  $\frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$
<b>Variabel Independen</b>			
1	Pendapatan asli daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	Diukur dengan membandingkan total realisasi PAD dengan total pendapatan pemerintah daerah (Pratama dkk.,2022)  $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$

		dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Zahrah et al., 2024)	
2	Dana perimbangan	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi untuk menciptakan keseimbangan keuangan antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Niswani et al., 2022)	Diukur dengan membandingkan total dana perimbangan yang diterima dengan total pendapatan pemerintah daerah (Pratama dkk.,2022)  $\frac{\text{Realisasi dana perimbangan}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$
3	Belanja modal	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Niswani et al., 2022)	Diukur dengan rasio efektivitas belanja modal dimana membandingkan antara realisasi belanja modal dengan realisasi belanja daerah (Jauharriah, 2022)  $\frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Realisasi belanja daerah}} \times 100\%$
4	Opini audit	Pernyataan professional yang dikeluarkan sebagai kesimpulan dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan (Pratama et al., 2022)	Variabel dummy dengan poin 1 untuk opini WTP dan poin 0 untuk opini selain WTP (Rahmah Pertiwi & Haryanto, 2022)

### 3.6.PENGUKURAN VARIABEL

Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel independen (PAD, dana perimbangan, dan belanja modal) dan variabel dependen (kinerja keuangan) adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala yang diterapkan pada variabel di mana kategorinya tidak hanya menunjukkan perbedaan, tetapi juga

mencerminkan adanya tingkatan yang berbeda, menunjukkan rentang nilai tertentu, dan dapat diperbandingkan (Prasetyo, 2016). Variabel PAD diukur dengan membandingkan realisasi PAD dengan realisasi pendapatan daerah. Variabel dana perimbangan diukur dengan membandingkan realisasi dana perimbangan dengan realisasi pendapatan daerah. Variabel belanja modal diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan realisasi belanja daerah. Variabel kinerja keuangan diukur menggunakan rasio efisiensi dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.

Metode pengukuran variabel independen berupa opini audit menggunakan skala nominal. Skala nominal adalah skala yang diterapkan pada variabel di mana kategorinya hanya dapat digunakan untuk membedakan satu kategori dari kategori lainnya (Prasetyo, 2016). Pemberian angka atau poin pada setiap kategori tidak dapat menjadi dasar untuk menentukan bobot karena angka atau poin tersebut hanya untuk membedakan antarkategori. Opini WTP diberikan poin 1 dan opini selain WTP diberikan poin 0.

### **3.7. METODE ANALISIS DATA**

#### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif menggambarkan data variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan lain-lain (Jauharriah, 2022). Ukuran statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan bebas dari gejala multikolinearitas, gejala heterokedastisitas, dan gejala autokorelasi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi apakah berdistribusi normal (Diana, 2020). Data penelitian yang baik yaitu data yang mempunyai distribusi nilai residual normal atau mendekati normal atau sebagian besar nilai residual mendekati nilai rata-ratanya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat titik-titik data data yang menyebar searah di sekitar garis diagonal.

Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari tabel hasil uji statistik non-parametik *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (p-value) yang diperoleh dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 5% Sedangkan, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikan kurang dari 5%, data (Diana, 2020).

#### 3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari

nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kriteria untuk menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas adalah:

1. Jika nilai *tolerance*  $< 0,1$  atau nilai VIF  $> 10$ , dapat dikatakan ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  atau nilai VIF  $< 10$ , dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Jika terdapat korelasi maka terdapat masalah korelasi. Masalah ini terjadi karena kesalahan pengganggu (residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik jika tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam regresi linier dapat mengganggu suatu model dan menyebabkan kebiasaan pada kesimpulan yang diambil. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Run test*. Kriteria pengambilan keputusan atas *run test* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed)  $< 0,05$ , disimpulkan terdapat autokorelasi
2. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed)  $> 0,05$ , disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

### 3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki varians residual yang tidak konstan (Sari, 2017). Heteroskedastisitas merupakan kebalikan dari homoskedastisitas yang hasil varians residualnya

konstan. Model regresi berganda dikatakan baik apabila hasilnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Kriteria pengambilan keputusan atas uji *Glejser* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikannya  $>$  dari 0,05, dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikannya  $<$  dari 0,05, dikatakan terdapat heteroskedastisitas

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian ini menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan). Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan

a = Intersep (konstanta)

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = koefisien regresi

$X_1$  = Pendapatan asli daerah (PAD)

X<sub>2</sub> = Dana perimbangan (DP)

X<sub>3</sub> = Belanja modal (BM)

X<sub>4</sub> = Opini audit (OA)

e = *error*

### 3.7.4 Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit Model*)

#### 3.7.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji model regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau keseluruhan. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 5% maka disimpulkan terdapat Goodness of Fit Model yang berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki Goodness of Fit Model yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

#### 3.7.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi atau *R Square* (R<sup>2</sup>) adalah ukuran untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Hasil regresi dikatakan semakin baik jika nilai R<sup>2</sup> semakin besar atau nilainya mendekati 1. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

**Tabel 3. 2 : Interval Koefisien Determinasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,19	Sangat Lemah
0,20 – 0,39	Lemah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

### 3.7.5 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.5.1 Uji Parsial (Uji Signifikansi T)

Uji koefisien regresi secara parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Jauharriah, 2022). Kriteria pengambilan keputusan atas pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig < 0,05$ , hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig > 0,05$ , hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Letak dan kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di  $5^{\circ}40'$  –  $8^{\circ}30'$  lintang selatan dan  $108^{\circ}30'$  –  $111^{\circ}30'$  bujur timur. Provinsi ini memiliki bentang alam yang bervariasi, dari pegunungan, dataran rendah, hingga panta. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa pada bagian utara, Samudera Hindia dan Provinsi DIY pada bagian Selatan, Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, serta Provinsi Jawa Barat pada bagian barat. Dalam pelaksanaan administratif, Provinsi Jawa Tengah dibagi 29 kabupaten serta 6 kota. Kota tersebut diantaranya Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Setiap kota tersebut dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota yang memiliki visi dan misi dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 PENYAJIAN DATA**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 yang terdiri dari 6 (enam) pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2023 di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh adalah metode dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 54 yang terdiri dari 6 (enam) pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2015-2023 di Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber media *online* yaitu laporan keuangan pada LHP atas LKPD pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2023 yang diperoleh dari BPK RI dan data opini BPK melalui dari *website* BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

### 4.3 ANALISIS DATA

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IBM SPSS Statistics versi 27.

#### 4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan menggambarkan data masing-masing variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan lain-lain (Jauharriah, 2022). Dalam penelitian ini statistik deskriptif memberi gambaran keterangan dari variabel dependen yaitu kinerja keuangan dengan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), belanja modal (BM), dan opini audit (OA). Hasil statistik deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 : Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	54	18.78	52.97	30.0347	8.02548
DP	54	33.98	69.80	56.2075	9.40833
BM	54	8.07	29.47	19.4257	5.47250
OA	54	0	1	.89	.317
KK	54	84.38	109.17	99.9943	4.75847
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Berdasarkan dari tabel 4.1 maka hasil analisis statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini yaitu sebanyak 54 data, data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 30.0347 dengan nilai minimum yaitu sebesar 18,78 dan nilai maksimum sebesar 52,97. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi sebesar 8.02548. Nilai standar deviasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tingkat variasi data yang normal.
- (2) Variabel Independen Dana Perimbangan (DP), hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 56.2075. Kemudian memiliki nilai minimum yaitu sebesar 33.98 dan nilai maksimum sebesar 69.80. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi sebesar 9.40833. Nilai standar deviasi variabel Dana Perimbangan (DP) lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki tingkat variasi data yang normal.
- (3) Variabel Independen Belanja Modal (BM), hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 19.4257 dengan nilai minimum yaitu sebesar 8.07 dan nilai maksimum sebesar 29.47. Nilai dari standar deviasi sebesar 5.47250. Nilai standar deviasi variabel Belanja Modal (BM) lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal

itu menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal (BM) memiliki tingkat variasi data yang normal.

- (4) Variabel Independen Opini Audit (OA), hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 0.89 dengan nilai minimum yaitu sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai dari standar deviasi sebesar 0,317. Nilai standar deviasi variabel Opini Audit (Opini) lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Opini Audit (Opini) memiliki tingkat variasi data yang normal.
- (5) Variabel Dependen Kinerja Keuangan (KK), hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 99.9943 dengan nilai minimum yaitu sebesar 84.38 dan nilai maksimum sebesar 109.17. Nilai dari standar deviasi sebesar 4.75847. Nilai standar deviasi variabel Kinerja Keuangan (KK) lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan (KK) memiliki tingkat variasi data yang normal.

#### **4.3.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **1.4.1.1 Uji Normalitas**

Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*. Data penelitian yang baik adalah data yang mempunyai distribusi nilai residual normal atau mendekati normal atau sebagian besar nilai residual mendekati nilai rata-ratanya. Data dapat dikatakan terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari tabel hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai signifikan menunjukkan nilai signifikan lebih dari

5%, data dapat dikatakan berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Test of Normality Kolomogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 : Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		54	
Normal <u>Parameters<sup>a,b</sup></u>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	4.30803523	
Most Extreme Differences	Absolute	.118	
	Positive	.052	
	Negative	-.118	
Test Statistic		.118	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.068	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.068	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.059
		Upper Bound	.072

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Berdasarkan hasil dari uji normalitas menggunakan Test of Normality Kolomogorov-Smirnov, nilai signifikan menunjukkan sebesar 0.066. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

#### 1.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10, dapat dikatakan ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai tolerance lebih besar dari

0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 : Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	PAD	.223	4.475	Tidak ada multikolinearitas
	DP	.224	4.460	Tidak ada multikolinearitas
	BM	.984	1.016	Tidak ada multikolinearitas
	OA	.968	1.033	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Hasil uji multikolinearitas atas variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0,223 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 4,475 atau lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas atas variabel Dana Perimbangan (DP) menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0,224 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 4,460 atau lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas atas variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0,984 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,016 atau lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas atas variabel Opini Audit (OA) menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0.968 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,033 atau lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 1.4.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji run test adalah salah satu metode dalam uji autokorelasi. Uji run test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada uji run test lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05, dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada uji run test lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05, dapat disimpulkan terdapat autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi

<b>Runs Test</b>	
	<b>Unstandardized Residual</b>
<b>Test Value<sup>a</sup></b>	.52745
<b>Cases &lt; Test Value</b>	27
<b>Cases &gt;= Test Value</b>	27
<b>Total Cases</b>	54
<b>Number of Runs</b>	24
<b>Z</b>	-1.099
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>	.272

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi menggunakan uji run test, nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0,272. Hal ini berarti nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 1.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki varians residual yang tidak konstan. Model regresi berganda dikatakan baik apabila hasilnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode glejser. Jika nilai signifikansi menunjukkan lebih besar dari 5% atau 0,05, dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil dari 5% atau 0,05, dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.957	7.937		.877	.385
	PAD	.019	.103	.053	.182	.856
	DP	-.045	.088	-.149	-.515	.609
	BM	-.110	.072	-.211	-1.528	.133
	QA	.399	1.253	.044	.318	.752

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas atas variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,856. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih

besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas atas variabel Dana Perimbangan (DP) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,609. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas atas variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,133. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas atas variabel Opini Audit (OA) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,752. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### **4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85.640	12.490		5.255	.000
	PAD	.355	.162	.599	2.188	.033
	DP	.308	.138	.609	2.231	.030
	BM	.197	.113	.227	1.738	.088
	OA	2.867	1.972	.191	1.454	.152

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Atas hasil perhitungan di atas, persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 65,640 + 0,355 (PAD) + 0,308 (DP) + 0,197 (BM) + 2.867 (OA) + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat diinterpretasikan yaitu:

- Nilai konstanta sebesar 65,640, artinya apabila semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Belanja Modal (BM), dan Opini Audit (OA), maka kinerja keuangannya bernilai 65,640
- Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai 0,355. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan diikuti kenaikan kinerja keuangan sebesar 0,355 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (DP) bernilai 0,308. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan DP sebesar 1% akan diikuti

kenaikan kinerja keuangan sebesar 0,308 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

- d. Koefisien regresi variabel Belanja Modal (BM) bernilai 0,197. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan BM sebesar 1% akan diikuti kenaikan kinerja keuangan sebesar 0,197 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- e. Koefisien regresi variabel Opini Audit (OA) bernilai 2.867. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan Opini sebesar 1% akan diikuti kenaikan kinerja keuangan sebesar 2.867 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

#### **4.3.4 Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit Model*)**

##### **4.3.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F digunakan untuk menguji model regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau keseluruhan. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat Goodness of Fit Model yang berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel dan nilai signifikansi lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki Goodness of Fit Model yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4. 7 Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218.447	4	54.112	2.696	.041 <sup>b</sup>
	Residual	983.638	49	20.074		
	Total	1200.083	53			

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Berdasarkan hasil dari uji statistik F, nilai F-hitung menunjukkan sebesar 2.696 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 sedangkan nilai F-tabel sebesar 2,56. Hal ini berarti nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ( $2.696 > 2,56$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,041 < 0,005$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki *Goodness of Fit Model* yang berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

#### 4.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi atau *R Square* ( $R^2$ ) adalah ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Hasil regresi dikatakan semakin baik jika nilai  $R^2$  semakin besar atau nilainya mendekati 1 berarti variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.425 <sup>a</sup>	.180	.113	4.48042

Sumber: Output SPSS 27, 2024

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square (Adjusted R<sup>2</sup>) menunjukkan sebesar 0.113. Hal ini berarti 11,3% kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit. Sedangkan, sisanya 88,7% (100%-11,3%) kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel lain.

### 4.3.5 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.5.1 Uji Parsial (Uji Signifikansi T)

Uji koefisien regresi secara parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4. 9 Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85.640	12.490		5.255	.000
	PAD	.355	.162	.599	2.188	.033
	DP	.308	.138	.609	2.231	.030
	BM	.197	.113	.227	1.738	.088
	OA	2.867	1.972	.191	1.454	.152

Sumber: Output SPSS 27, 2024

#### a. Hipotesis Pertama

Uji hipotesis pertama dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait adanya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini, hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,188 > 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih

kecil dari 5% ( $0,033 < 0,05$ ). Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

b. Hipotesis Kedua

Uji hipotesis kedua dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait adanya pengaruh dana perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini, hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,231 > 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,030 < 0,05$ ). Hal ini berarti variabel dana perimbangan (DP) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

c. Hipotesis Ketiga

Uji hipotesis ketiga dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait adanya pengaruh belanja modal (BM) terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini, hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $1,738 < 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,088 > 0,05$ ). Hal ini berarti variabel belanja modal (BM) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

d. Hipotesis Keempat

Uji hipotesis keempat dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait adanya pengaruh opini audit (OA) terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini, hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $1,454 < 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,152 > 0,05$ ). Hal ini berarti variabel opini audit (OA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### 4.4 PEMBAHASAN

Pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerahnya melalui peningkatan dan penggunaan potensi kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah kota berupaya menggali, memanfaatkan, dan meningkatkan potensi kekayaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan kinerja keuangannya melalui pendapatan asli daerah. Pemerintah kota juga memanfaatkan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Pemerintah kota juga melakukan belanja modal untuk meningkatkan kekayaan dan aset daerah sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat dan kinerja keuangan daerah juga akan meningkat. Pemerintah kota juga berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya melalui opini audit WTP dari BPK sehingga kinerja keuangannya akan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di provinsi Jawa Tengah. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pengaruhnya, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

##### 4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,188 > 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,033 < 0,05$ ). Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja

keuangan. Penelitian ini sejalan dengan (Pangestu, 2023) dan (Fatmawasti & Pratiwi, 2019) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan semakin tinggi PAD yang diperoleh maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga pemerintah daerah dapat memaksimalkan pembangunan daerahnya dan akan menambah potensi kekayaan daerah tersebut sehingga juga akan meningkatkan PAD.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel dana perimbangan (DP) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,231 > 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,030 < 0,05$ ). Hal ini berarti variabel dana perimbangan (DP) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wahyudin & Hastuti, 2020) dan (Fatmawasti & Pratiwi, 2019) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan adanya dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin meningkat karena sumber dana untuk melaksanakan pembangunan pada daerah tersebut semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan pembangunan daerah, potensi kekayaan daerah akan semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut melalui peningkatan potensi pendapatan daerah.

#### **4.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel belanja modal (BM) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $1,738 < 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,088 > 0,05$ ). Hal ini berarti variabel belanja modal (BM) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Jauharriah, 2022) dan (Pangestu, 2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditandai dengan rasio belanja modal terhadap belanja daerah pada pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2015-2023 masih hanya berkisar 8%-29% dari postur belanja pada APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota di Jawa Tengah belum dapat memanfaatkan anggaran belanja daerah secara baik ke dalam bentuk investasi belanja modal karena adanya prioritas kebutuhan lain. Salah satu prioritas kebutuhan lain tersebut yaitu pemerintah daerah mengurangi belanja modal untuk belanja lain selain belanja modal sebagai bentuk pemulihan atas adanya Covid-19 pada tahun 2019. Selain itu, tidak semua belanja modal dapat menghasilkan sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya melainkan juga dapat mengakibatkan pemborosan keuangan daerah karena belanja modal tidak dilakukan secara tepat.

#### **4.4.4 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel opini audit (OA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $1,454$

$< 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,152 > 0,05$ ). Hal ini berarti variabel opini audit (OA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pratama dkk., 2022) dan (Setiawan dkk., 2020) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditandai dengan kriteria pemberian opini audit juga didasarkan terhadap kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, dan efektivitas dalam sistem pengendalian internal. Selain itu, pemerintah kota di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023 hampir secara keseluruhan mendapatkan opini WTP setiap tahunnya kecuali Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kota Salatiga, dan Kota Semarang pada tahun 2015 serta Kota Tegal pada tahun 2015-2017 mendapatkan opini WDP. Sedangkan, kinerja keuangan pemerintah kota di Jawa Tengah pada tahun 2017-2023 mengalami fluktuatif (naik turun).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,188 > 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,033 < 0,05$ ).
- (2) Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,231 > 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,030 < 0,05$ ).
- (3) Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $1,738 < 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,088 > 0,05$ ).
- (4) Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $1,454 < 2,00958$ ) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,152 > 0,05$ ).

## 5.2 IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan diatas, maka implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini yaitu:

1) Bagi penelitian selanjutnya

- (1) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas penelitiannya dengan menambah jumlah sampel penelitian.
- (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2) Bagi pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bahan masukan, motivasi serta evaluasi untuk mengembangkan strategi, kebijakan maupun program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah

## 5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Setelah melakukan analisis data, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa keterbatasan yaitu:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan pemerintah kota di Jawa Tengah untuk menjadi sampel dalam penelitian, sehingga hasil yang didapatkan belum bisa sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

#### **5.4 AGENDA PENELITIAN MENDATANG**

Hasil dari penelitian ini serta keterbatasan-keterbatasan yang telah ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan sumber ide bagi penelitian selanjutnya, dimana diperlukan adanya pengembangan variabel yang dapat memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian penulis juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat menambah jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian selanjutnya agar hasilnya dapat lebih baik dalam menjelaskan faktor kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 1–6.
- BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. (2018). *Apa Itu Opini BPK*. <https://sumbar.bpk.go.id/apa-itu-opini-bpk/>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Diana, S. I. (2020). *Pengaruh Ukuran Daerah, Pajak Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2018)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Endri, L., & Dini, H. W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2743–2750.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Fatmawasti, A. P., & Pratiwi, O. C. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi Politeknik Pos Indonesia*, 12(2), 62–69. <https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/610>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen (Edisi Pertama)*. BPFPE.
- Ivana, D. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta)*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Jauharriah, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021. In *Skripsi*.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166.

- Maharani, D. A., & Arofah, A. A. (2021). Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 14(1), 113–122.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Pusaka Almailda.
- Malik, A. (2018). *Pengantar Statistika Pendidikan*. Deepublish.
- Niswani, N., Ikhyannuddin, Firdaus, R., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 64–77.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088.
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1–9.
- Prasetyo, B. (2016). *Pengantar Statistik Sosial Edisi 3*. Universitas Terbuka.
- Pratama, A. B., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *E\_ Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(02), 25–34.
- Putra, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2020. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1), 1–13.
- Rahmah Pertiwi, A., & Haryanto. (2022). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sari, W. K. (2017). *Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Profitabilitas (ROA) (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Perbankan Umum dan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Setiawan, R., Oktaroza, M. L., & Purnamasari, P. (2020). Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, dan Hasil Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Akuntansi*, 6(1), 484–488. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21189>
- Sir, J. S., Samadara, S., & Manuain, D. W. (2021). Audit Opinion and Financial Performance of Local Governments in East Nusa Tenggara. *Atlantis Press*, 544, 478–482.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal*

*Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 19–40.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan 2)*. Alfabeta.

Surachman, E. N., & Handayani, D. (2020). *Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publk*. PKN STAN.

Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2364>

Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37.

Zahrah, F. A., Zaen. Muhammad Rafi, & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/2422/1886>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Rasio Total Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahunn 2015-2023

<b>Tahun</b>	<b>Kota Magelang</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Kota Surakarta</b>	<b>Kota Tegal</b>
2015	23,89%	18,78%	22,25%	35,90%	23,77%	28,67%
2016	26,23%	20,83%	23,16%	36,35%	24,99%	27,34%
2017	25,68%	20,96%	24,95%	45,20%	29,24%	29,94%
2018	27,52%	19,80%	23,48%	43,01%	27,95%	27,86%
2019	28,27%	21,90%	25,44%	45,26%	28,06%	27,54%
2020	30,73%	24,12%	24,66%	46,01%	26,91%	26,19%
2021	32,12%	26,08%	29,66%	49,47%	28,91%	29,89%
2022	38,28%	26,64%	26,24%	51,23%	31,92%	32,61%
2023	32,06%	25,61%	28,82%	52,97%	34,55%	32,01%

**Lampiran 2 : Rasio Total Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan  
Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Kota Magelang</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Kota Surakarta</b>	<b>Kota Tegal</b>
2015	59,23%	60,66%	60,75%	37,95%	48,18%	52,86%
2016	67,57%	69,80%	64,77%	40,07%	64,82%	65,47%
2017	60,81%	64,00%	67,19%	41,39%	58,10%	62,94%
2018	62,82%	64,78%	63,04%	33,98%	58,06%	61,04%
2019	59,32%	62,82%	61,35%	38,08%	57,06%	61,88%
2020	55,55%	59,52%	58,64%	37,93%	57,07%	61,21%
2021	53,34%	60,67%	56,46%	35,24%	54,50%	58,02%
2022	53,31%	62,07%	59,72%	36,01%	57,03%	59,48%
2023	56,10%	62,88%	58,47%	35,39%	55,20%	60,59%

**Lampiran 3 : Rasio Total Belanja Modal Terhadap Total Pendapatan  
Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Kota Magelang</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Kota Surakarta</b>	<b>Kota Tegal</b>
2015	18,71%	21,63%	18,62%	27,06%	19,36%	14,76%
2016	19,20%	19,89%	15,90%	22,69%	15,39%	21,64%
2017	25,47%	23,23%	29,06%	26,11%	18,30%	23,14%
2018	26,52%	23,88%	25,65%	29,47%	26,57%	20,22%
2019	25,35%	16,57%	24,04%	27,27%	27,37%	12,40%
2020	27,35%	19,09%	19,50%	22,77%	27,02%	15,87%
2021	14,60%	13,43%	18,44%	12,27%	15,32%	14,14%
2022	19,89%	16,68%	13,62%	20,02%	18,27%	13,43%
2023	14,89%	19,06%	8,07%	21,53%	18,24%	12,79%

**Lampiran 4 : Opini Audit Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2015-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Kota Magelang</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Kota Surakarta</b>	<b>Kota Tegal</b>
2015	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP
2016	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
2017	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
2018	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2019	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2020	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2021	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2022	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2023	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**Lampiran 5 : Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Di Provinsi**

**Jawa Tengah Tahun 2015-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Kota Magelang</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Kota Surakarta</b>	<b>Kota Tegal</b>
2015	94,18%	97,88%	89,78%	95,63%	97,71%	101,20%
2016	103,71%	101,36%	104,53%	95,82%	98,68%	102,18%
2017	96,63%	100,90%	96,23%	109,17%	97,98%	99,20%
2018	103,15%	97,56%	103,77%	106,40%	101,85%	92,79%
2019	102,77%	98,23%	101,51%	101,48%	103,37%	100,86%
2020	84,38%	99,13%	106,07%	93,77%	89,48%	102,95%
2021	94,03%	99,56%	101,09%	98,78%	96,25%	105,70%
2022	105,45%	104,25%	101,47%	98,04%	102,93%	108,16%
2023	100,70%	100,33%	102,79%	99,77%	105,94%	102,17%